



**DATA STATISTIK SEKTORAL
PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN**

PROFIL UMKM DIY



**Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah
Tahun 2022**

Kata Pengantar


Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia merupakan kebijakan Satu Data Indonesia yang dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan di Indonesia. Kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang diamanatkan dalam kebijakan Satu Data Indonesia tersebut merupakan terobosan penting untuk mewujudkan perbaikan tata kelola data.

Data yang valid merupakan salah satu kunci pembangunan nasional. Data yang valid sangat dibutuhkan dalam menyusun perencanaan, anggaran, bahkan membuat kebijakan, sehingga eksekusi dari kebijakan tersebut memperoleh hasil yang positif, guna mewujudkan pembangunan nasional yang lebih baik di masa depan.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Buku Data Statistik Sektoral Perencanaan dan Pengendalian dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini mengambil tema profil data UMKM DIY yang menggambarkan kondisi dan perkembangan UMKM DIY sebelum dan sesudah Peraturan Gubernur DIY Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah DIY.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga buku ini dapat diselesaikan tepat waktu dan semoga bermanfaat.

Yogyakarta, April 2022
Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta



Drs. Beny Suharsono, M.Si
NIP. 19650512 198602 1 002

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v

BAB 1

Pendahuluan

A. Kondisi Umum Daerah	2
B. Luas dan Batas Wilayah	4
C. Letak dan Kondisi Geografis	5
D. Demografi	6
E. Kepadatan Penduduk	7
F. Penduduk Lansia	9
G. Rasio Jenis Kelamin	10
H. Laju Pertumbuhan Penduduk	12

BAB 2

MENGENAL UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

A. Usaha Mikro	14
B. Usaha Kecil	14
C. Usaha Menengah	14
D. Sektor-Sektor UMKM	15
E. Peran dan Fungsi UMKM	16
F. Kendala UMKM	17

BAB 3

UMKM DIY Sebelum Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2019

A. UMKM DIY	20
B. Mengenal Sektor-Sektor UMKM	22
C. Jumlah UMKM DIY menurut Kategori	23
D. Jumlah Tenaga kerja UMKM di DIY Tahun 2018 – 2019	25

BAB 4

UMKM DIY Setelah Peraturan Gubernur No. 82 Tahun 2019

A. Alasan Perubahan Pengkategorian Jumlah Usaha per Sektor Ekonomi	28
B. Sektor UMKM Setelah Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2019	29
C. Jumlah UMKM di DIY Menurut Sektor	39
D. Jumlah Tenaga kerja UMKM	41
E. UMKM Berdasarkan Kabupaten atau Kota	43
F. Perbedaan UMKM DIY Sebelum dan Setelah Peraturan Gubernur No. 82 Tahun 2019 Menurut Nilai Omset	44

BAB 5

Penutup...	47
-------------------------	----

Daftar Gambar

Gambar 1. 1. Peta Administrasi DIY

Gambar 1. 2. Peta Bentuk Lahan DIY

Gambar 1. 3. Presentase Luas Wilayah DIY Berdasarkan Kabupaten/Kota

Gambar 1. 4. Peta Morfologi Lahan DIY

Gambar 1. 5. Jumlah dan laju pertumbuhan Penduduk DIY 1961 – 2020

Gambar 1. 6. Peta Kepadatan Penduduk DIY menurut Kecamatan 2020

Gambar 1. 7. Komposisi penduduk DIY menurut kelompok umur 1971 – 2020

Gambar 1. 8. Persentase penduduk lansia DIY 1990 – 2020

Gambar 1. 9. Rasio Jenis Kelamin Penduduk DIY Menurut Kelompok Umur 2020

Gambar 1. 10. Rasio Jenis Kelamin Penduduk DIY menurut Kabupaten/Kota 2020

Gambar 3. 1. Infografis UMKM DIY Sebelum Peraturan Gubernur No.82 Tahun 2019

Gambar 4. 1. Infografis UMKM di DIY Setelah Peraturan Gubernur No.82 Tahun 2019

Daftar Tabel

Tabel 1. 1. Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2020

Tabel 1. 2. Jumlah penduduk DIY hasil SP20 menurut kabupaten/kota dan jenis kelamin

Tabel 3. 1. Jumlah UMKM di DIY Tahun 2018

Tabel 3. 2. Jumlah UMKM di DIY Tahun 2019

Tabel 3. 3. Jumlah Tenaga Kerja UMKM di DIY Tahun 2018

Tabel 3. 4. Jumlah Tenaga Kerja UMKM di DIY Tahun 2019

Tabel 4. 1. Jumlah UMKM per Sektor Ekonomi di DIY Tahun 2020

Tabel 4. 2. Jumlah UMKM per Sektor Ekonomi di DIY Tahun 2021

Tabel 4. 3. Jumlah Tenaga Kerja UMKM di DIY Tahun 2020

Tabel 4. 4. Jumlah Tenaga Kerja UMKM di DIY Tahun 2021

Tabel 4. 5. Jumlah UMKM Berdasarkan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2021

Tabel 4. 6. Nilai Omset UMKM Menurut Skala Usaha Tahun 2018-2021



BAB 1

Pendahuluan

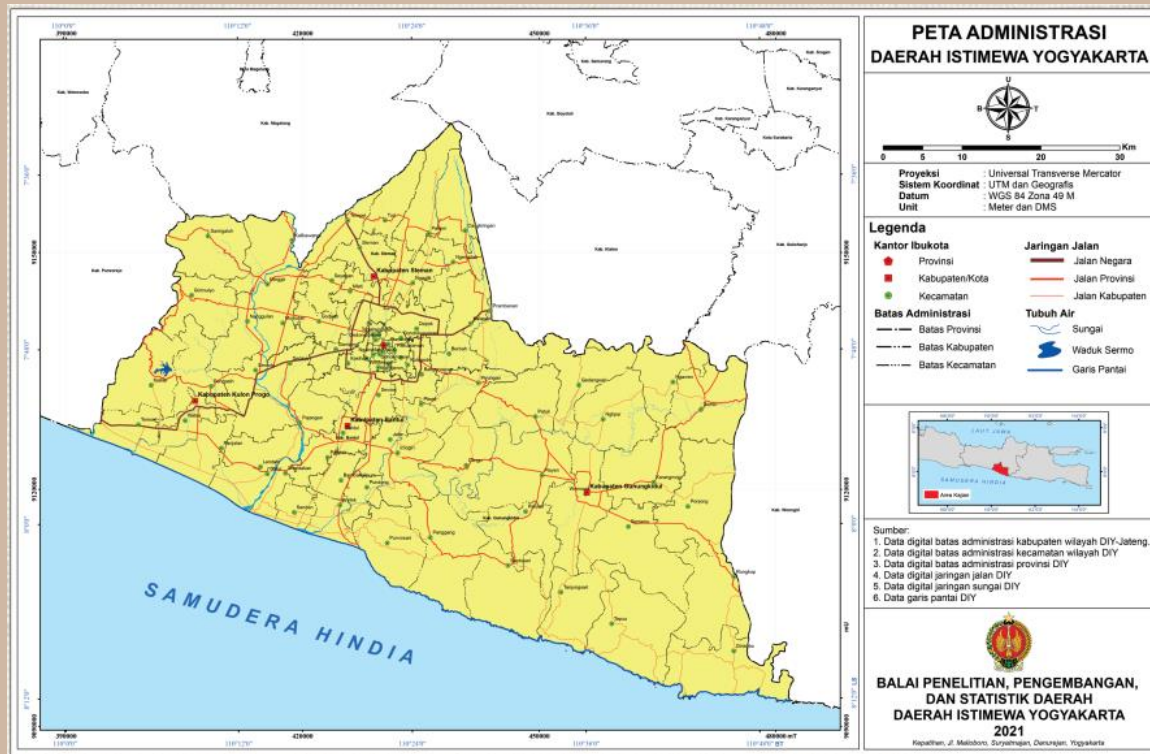
Secara astronomis, Daerah Istimewa Yogyakarta terletak diantara 7.33-8.12 Lintang Selatan dan 110.00-110.50 Bujur Timur. Secara geografis, DIY terletak di bagian tengah Pulau Jawa sisi selatan yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dengan perbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, sementara sebelah selatan DIY berbatasan dengan Samudra Hindia.



A. Kondisi Umum Daerah

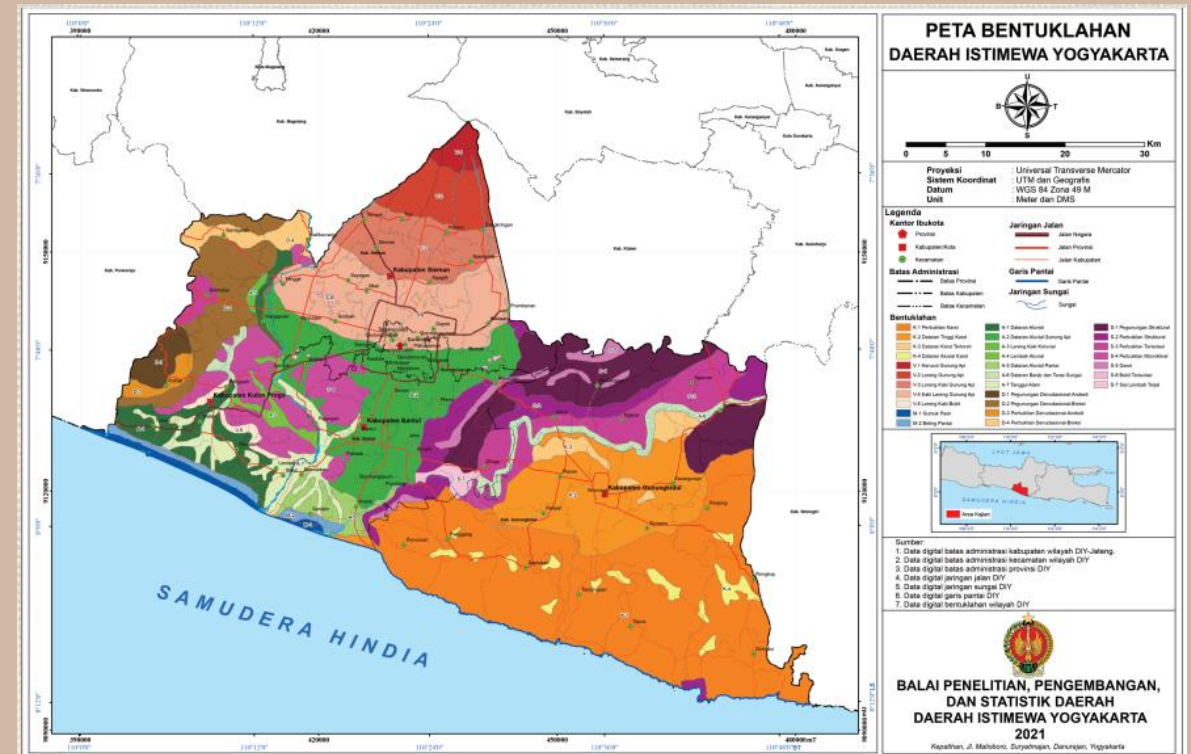


Batas Wilayah Administrasi dan Karakteristik Bentuk Lahan Daerah Istimewa Yogyakarta



Gambar 1. 1. Peta Administrasi DIY

Sumber: Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah DIY, 2021



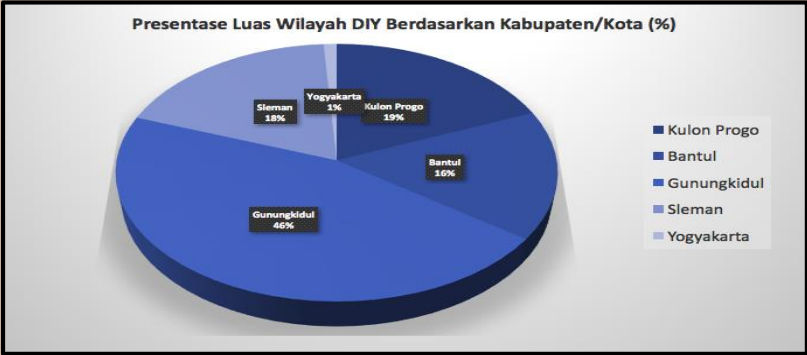
Gambar 1. 2. Peta Bentuklahan DIY

Sumber: Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah DIY, 2021

B. Luas dan Batas Wilayah

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah dengan luas wilayah yang relatif kecil dan berbatasan hanya dengan provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah DIY adalah 3.133,15 km² atau 0,17% dari total luas Indonesia 1.860.359,67 km². DIY merupakan daerah dengan luas terkecil setelah Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta. Secara pemerintahan, wilayah kabupaten/kota DIY dibagi menjadi 4 Kabupaten dan 1 kota yaitu Kabupaten Gunungkidul, Sleman, Bantul dan Kulon Progo serta Kota Yogyakarta. Sementara struktur pemerintahan di bawah kabupaten/kota meliputi 78 kepanewon, 392 kalurahan dan terdapat 46 kelurahan, yaitu:

- Kabupaten Kulon Progo terdiri dari 12 kepanewon, 87 kalurahan, dan 1 kelurahan
 - Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kepanewon dan 75 kalurahan
 - Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 18 kepanewon dan 144 kalurahan
 - Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kepanewon dan 86 kalurahan
 - Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kemantren dan 45 kelurahan
- Wilayah kabupaten/kota di DIY yang terluas adalah Kabupaten Gunungkidul, yaitu meliputi 45,69% dari luas DIY sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Yogyakarta, yaitu sebesar 1,04%.



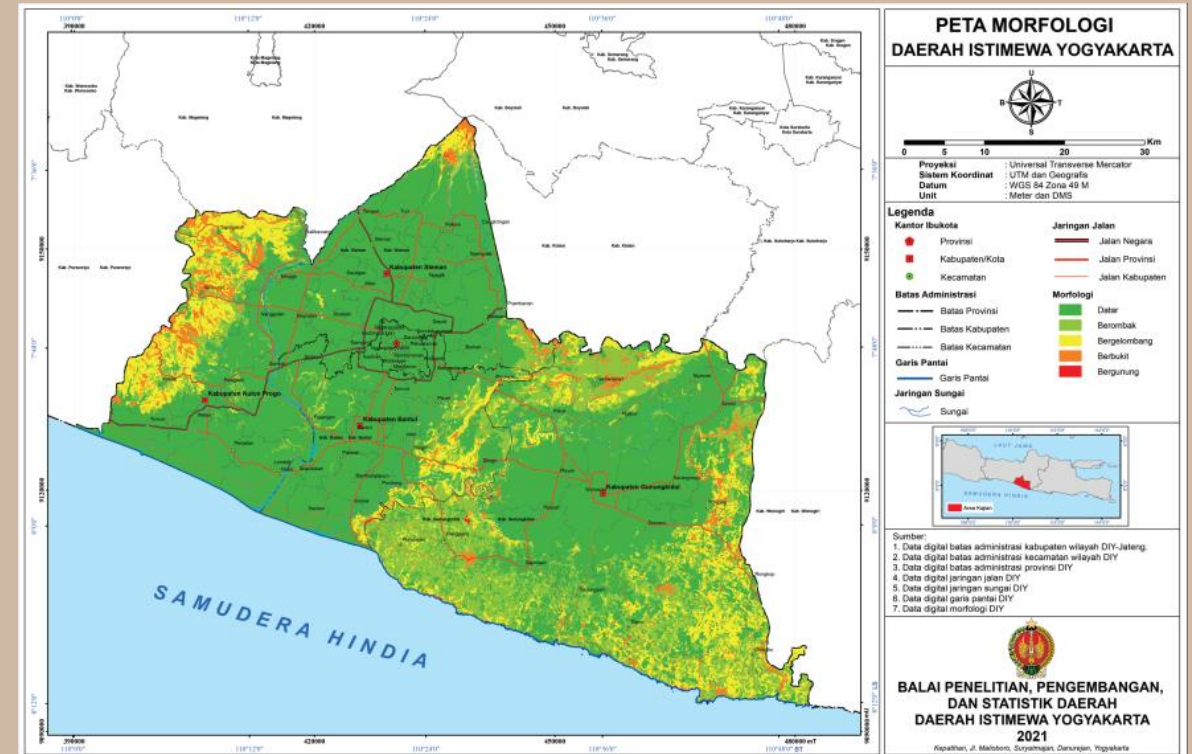
Gambar 1. 3. Presentase Luas Wilayah DIY Berdasarkan Kabupaten/Kota
Sumber: DIY Dalam Angka, BPS Provinsi DIY 2021

Tabel 1. 1. Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Ibukota Kabupaten	Luas Total Area (km2)	Persentase terhadap Luas Provinsi (Persen)	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibukota (km)
Kulon Progo	Wates	586,28	18,71	0-965	30
Bantul	Bantul	508,13	16,22	45	12
Gunungkidul	Wonosari	1431,42	45,69	185	39
Sleman	Sleman	574,82	18,35	32,93	16
Yogyakarta	Yogyakarta	32,50	1,04	114	0
D.I. Yogyakarta		3,133.15	100		

C. Letak dan Kondisi Geografis

DIY tidak memiliki kawasan pendalaman maupun kawasan terpencil. Menurut kondisi geografis, desa-desa di DIY terletak di daerah pesisir, lereng/punggung bukit, dan daerah dataran. Ditinjau dari posisi geostrategis, DIY berbatasan langsung dengan Samudra Hindia yang kaya akan sumberdaya laut. DIY memiliki 28 pulau sangat kecil namun memiliki nilai strategis karena merupakan titik pangkal penarikan batas teritorial wilayah laut NKRI. Pulau pulau tersebut termasuk dalam wilayah Kabupaten Gunungkidul dan tersebar pada lima kecamatan. Gambaran morfologi wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi dataran hingga perbukitan dan gunung tampak pada gambar berikut.



Gambar 1. 4. Peta Morfologi Lahan DIY

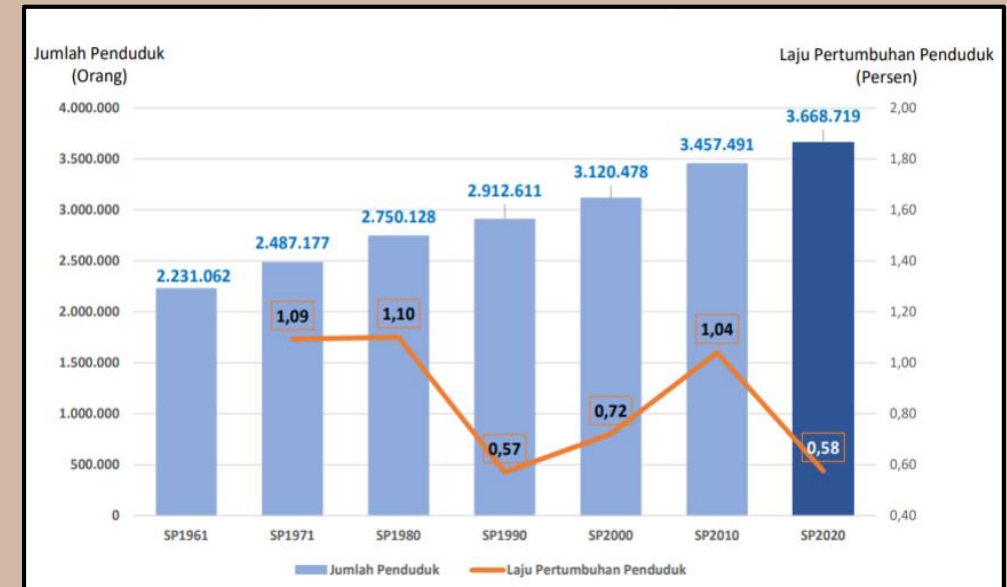
Sumber: Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah DIY, 2021

D. Demografi

Hasil Sensus Penduduk 2020 menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan September 2020 sebanyak 3,67 juta jiwa. Dibandingkan dengan sensus penduduk sebelumnya, jumlah penduduk D.I. Yogyakarta terus mengalami peningkatan. Dalam jangka waktu sepuluh tahun yaitu tahun 2010 hingga 2020, jumlah penduduk DIY mengalami penambahan sebanyak 211,23 ribu orang atau rata-rata 2,11 ribu orang setiap tahun. Secara keseluruhan, jumlah penduduk DIY telah bertambah sebanyak 1,44 juta orang sejak sensus penduduk pertama kali pada tahun 1961.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), laju pertumbuhan penduduk di wilayah DIY sebesar 0,58% per tahun. Angka tersebut menunjukkan penurunan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,64% jika dibandingkan dengan periode 2000-2010 yang sebesar 1,04%. Pertumbuhan periode 2010-2020 hampir sama dengan periode 1980-1990.

Sejak pelaksanaan sensus penduduk 1961, laju pertumbuhan penduduk tertinggi di DIY tercatat pada periode 1971-1980 yaitu sebesar 1,10%. Keberhasilan program Keluarga Berencana atau KB pada periode 1980-2000 yang terkenal mengkampanyekan “2 anak saja cukup, laki-laki dan perempuan sama saja” telah berhasil menurunkan laju pertumbuhan penduduk hanya di bawah 1%.

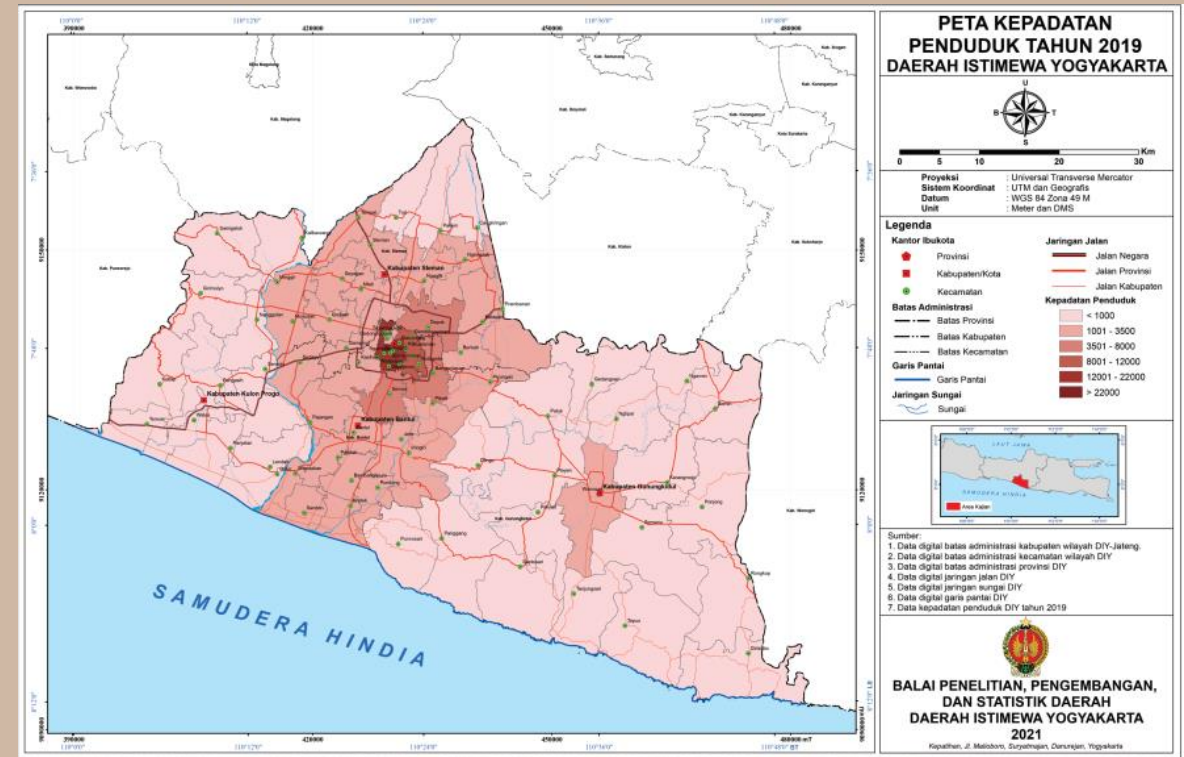


Gambar 1. 5. Jumlah dan laju pertumbuhan Penduduk DIY 1961 – 2020

Sumber: Buku Sensus Penduduk 2020, BPS Provinsi DIY 2021

E. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk DIY pada tahun 2020 berdasarkan Sensus Penduduk 2020 BPS adalah 1.151 jiwa/km² yang menurun tahun 2019 yaitu 1.206 jiwa/km². Terdapat perbedaan kepadatan penduduk antara wilayah di DIY. Distribusi penduduk DIY relatif tersebar secara merata di seluruh kabupaten/kota yang ada di wilayah ini. Meskipun demikian penduduk DIY relatif terkonsentrasi di Kabupaten Sleman. Penduduk paling banyak di DIY yaitu Kabupaten Sleman yaitu sebanyak 30,69%. Selanjutnya Bantul tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk kedua terbesar di DIY yaitu sebanyak 20,37%. Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta merupakan wilayah dengan persentase penduduk yang paling sedikit di DIY. Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di Kabupaten Kulon Progo tercatat sebanyak 11,90%. Sementara itu, Kota Yogyakarta mempunyai penduduk sebanyak 10,18% dari total penduduk DIY. Sebaran penduduk di DIY menurut kabupaten/kota berdasarkan Sensus Penduduk 2020 BPS ditunjukkan pada gambar berikut.



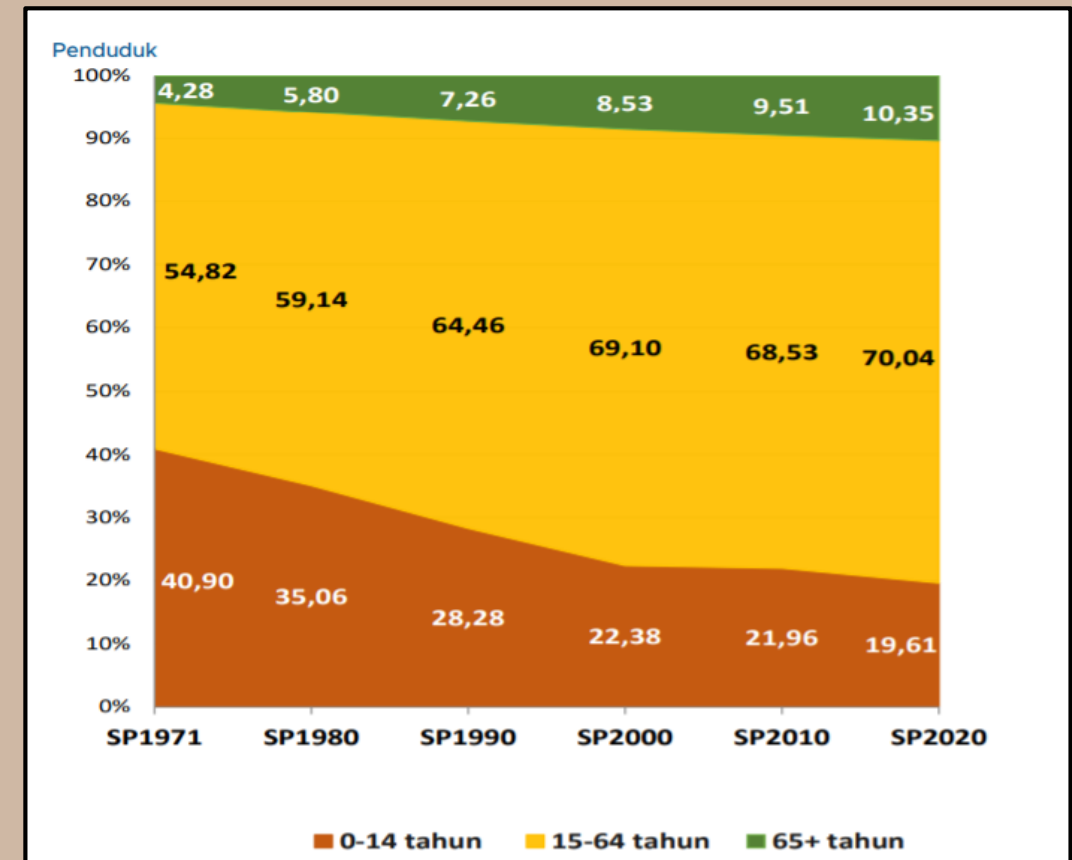
Gambar 1. 6. Peta Kepadatan Penduduk DIY menurut Kecamatan data tahun 2019

Sumber: Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah DIY, 2021

Berdasarkan survei penduduk antar sensus (Supas) 2015 jumlah penduduk Indonesia pada 2019 diproyeksikan mencapai 266,91 juta jiwa. Menurut jenis kelamin, jumlah tersebut terdiri atas 134 juta jiwa laki-laki dan 132,89 juta jiwa perempuan. Indonesia saat ini sedang menikmati masa bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari usia tidak produktif, yakni lebih dari 68% dari total populasi.

Pada tahun 1971 proporsi penduduk usia produktif adalah sebesar 54,8% dari total populasi. Persentase tersebut meningkat di tahun 2019 menjadi sebesar 68,7%. Pada tahun 2020 proporsi penduduk usia produktif meningkat menjadi 70,04%.

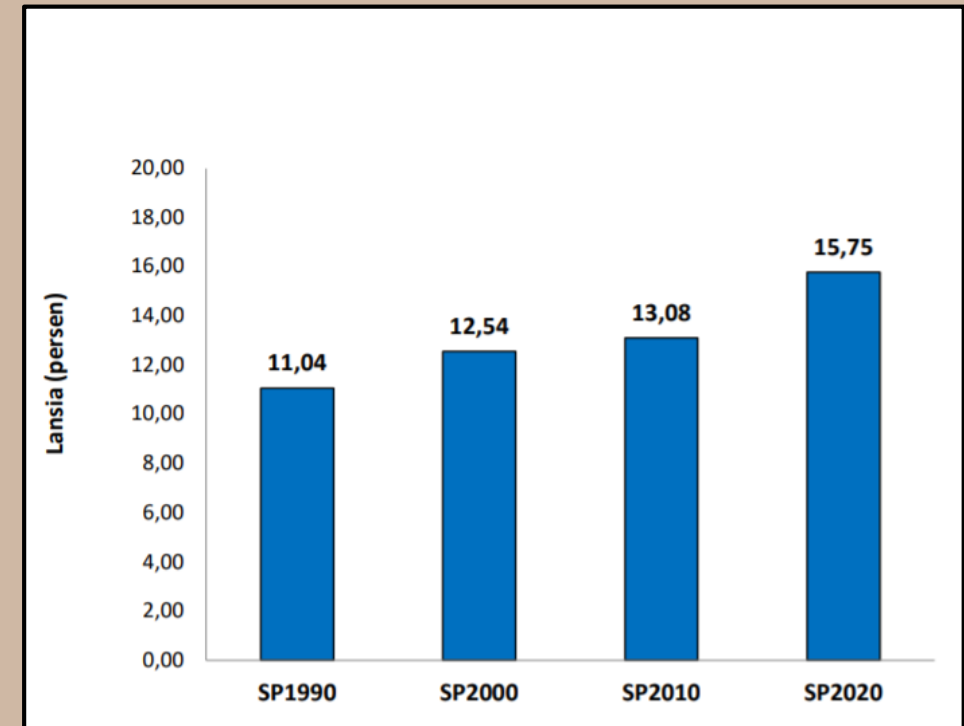
Hal ini mencerminkan bahwa D.I. Yogyakarta masih berada dalam masa bonus demografi dengan persentase penduduk usia produktif lebih dari 60%. Pada periode yang sama, persentase penduduk yang berusia di atas 65 tahun juga menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Adapun proporsi penduduk berusia 0-14 tahun justru menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun.



Gambar 1. 7. Komposisi penduduk DIY menurut kelompok umur 1971 – 2020
Sumber: Buku Sensus Penduduk 2020, BPS Provinsi DIY 2021

F. Penduduk Lansia

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki proporsi penduduk lanjut usia (lansia) paling tinggi di Indonesia, dengan 15,17%. Kemudian, diikuti dua provinsi lainnya di Pulau Jawa yakni Jawa Tengah dan Jawa Timur, di kisaran 13%. Hal tersebut terjadi karena DIY merupakan Provinsi dengan Usia Harapan Hidup (UHH) yang juga tertinggi di Indonesia. Persentase penduduk lansia DIY hasil Sensus Penduduk 2020 meningkat menjadi 15,75% dari 13,08% hasil Sensus Penduduk 2010. Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa DIY berada pada era *ageing population* yaitu ketika persentase penduduk usia 60 tahun ke atas mencapai 10% ke atas.

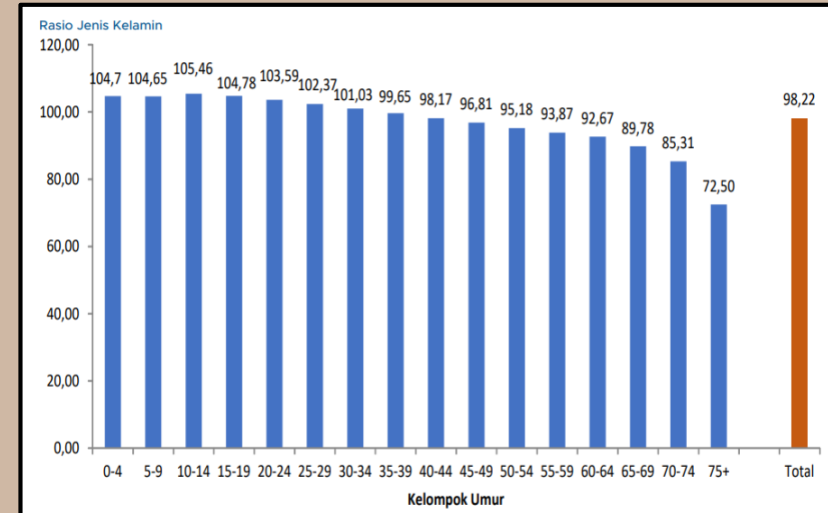


Gambar 1. 8. Persentase penduduk lansia DIY 1990 – 2020
Sumber: Buku Sensus Penduduk 2020, BPS Provinsi DIY 2021

G. Rasio dan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk laki-laki di Daerah Istimewa Yogyakarta hasil Sensus Penduduk 2020 sebanyak 1,82 juta orang, atau 49,55% dari penduduk DIY. Sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1,85 juta orang atau 50,45% dari penduduk, maka rasio jenis kelamin penduduk DIY yang tercatat sebesar 98,27.

Rasio jenis kelamin tersebut terlihat bervariasi menurut kelompok umur. Rasio jenis kelamin saat lahir mencerminkan pola dimana proporsi penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Pada kelompok usia 30-34 tahun, proporsi penduduk laki-laki lebih sedikit daripada perempuan. Selanjutnya, mulai kelompok umur 50 tahun ke atas proporsi penduduk laki-laki semakin mengalami penurunan yang disebabkan karena harapan hidup penduduk laki-laki lebih pendek dibandingkan penduduk perempuan. Komposisi penduduk berdasarkan rasio jenis kelamin dan kelompok umur dapat terlihat dalam gambar piramida penduduk berikut.

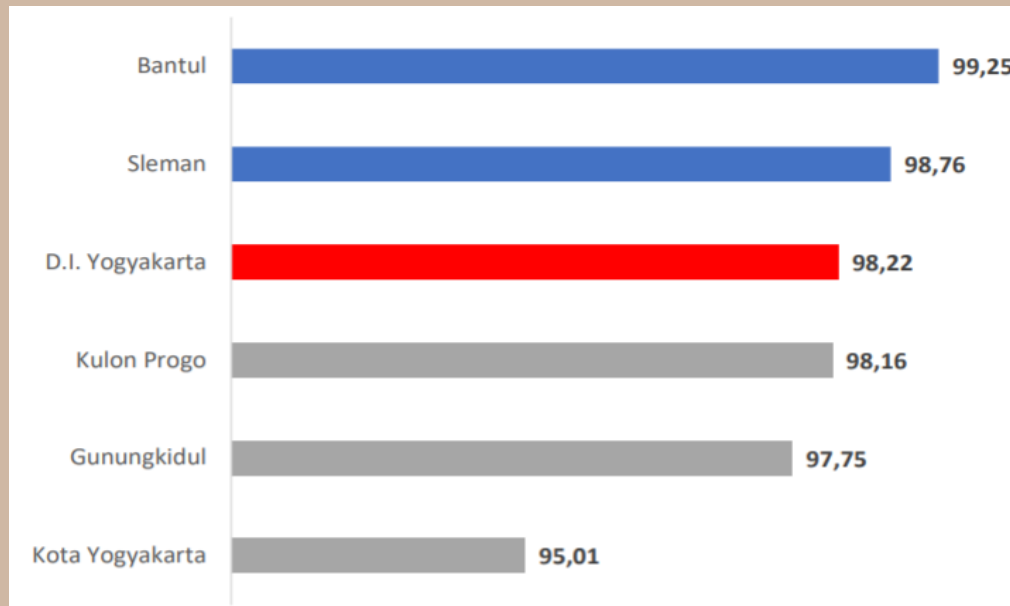


Gambar 1. 9. Rasio Jenis Kelamin Penduduk DIY Menurut Kelompok Umur 2020

Sumber: Buku Sensus Penduduk 2020, BPS Provinsi DIY 2021

Hasil Sensus Penduduk 2020 menunjukkan rasio jenis kelamin di tingkat kabupaten/kota secara umum selaras dengan tingkat provinsi, dimana proporsi penduduk laki-laki lebih sedikit daripada perempuan. Rasio jenis kelamin tertinggi terdapat di Kabupaten Bantul, dimana menurut hasil Sensus Penduduk 2020 rasio jenis kelamin di kabupaten ini tercatat sebesar 99,25. Sedangkan rasio jenis kelamin terendah tercatat di Kota Yogyakarta sebesar 95,01.

Hasil Sensus Penduduk 2020 menunjukkan rasio jenis kelamin di tingkat kabupaten/kota secara umum selaras dengan tingkat provinsi, dimana proporsi penduduk laki-laki lebih sedikit daripada perempuan. Rasio jenis kelamin tertinggi terdapat di Kabupaten Bantul, dimana menurut hasil Sensus Penduduk 2020 rasio jenis kelamin di kabupaten ini tercatat sebesar 99,25. Sedangkan rasio jenis kelamin terendah tercatat di Kota Yogyakarta sebesar 95,01.



Gambar 1. 10. Rasio Jenis Kelamin Penduduk DIY menurut Kabupaten/Kota 2020

Sumber: Buku Sensus Penduduk 2020, BPS Provinsi DIY 2021



H. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan jumlah penduduk DIY dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan migrasi. Dari data BPS Hasil Sensus Penduduk 2020, tercatat bahwa jumlah Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2020 (September 2020 sebesar 3.668.719 orang, selaras dengan data Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil pada bulan Desember 2020). Laju pertumbuhan penduduk per tahun di DIY per tahun (2010-2020) sebesar 0,58%. Angka tersebut menurun dibandingkan periode 2000-2010 sebesar 1,03%. Persentase Penduduk Usia Produktif (15-64) sebesar 70,04%, persentase Penduduk Lansia 15,75% naik dibandingkan tahun 2010 sebesar 13,08%. Sleman merupakan penduduk terbesar dengan konsentrasi 1,13 juta orang (30,59% dari total penduduk DIY).

Tabel 1. 2. Jumlah penduduk DIY hasil SP20 menurut kabupaten/kota dan jenis kelamin

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
	Laki – Laki	Perempuan	Total
Kulon Progo	216.167	220.228	436.395
Bantul	491.033	494.737	985.770
Gunungkidul	369.323	377.838	747.161
Sleman	559.385	566.419	1.125.804
Kota Yogyakarta	182.019	191.570	373.589
D.I. Yogyakarta	1.817.927	1.850.792	3.668.719

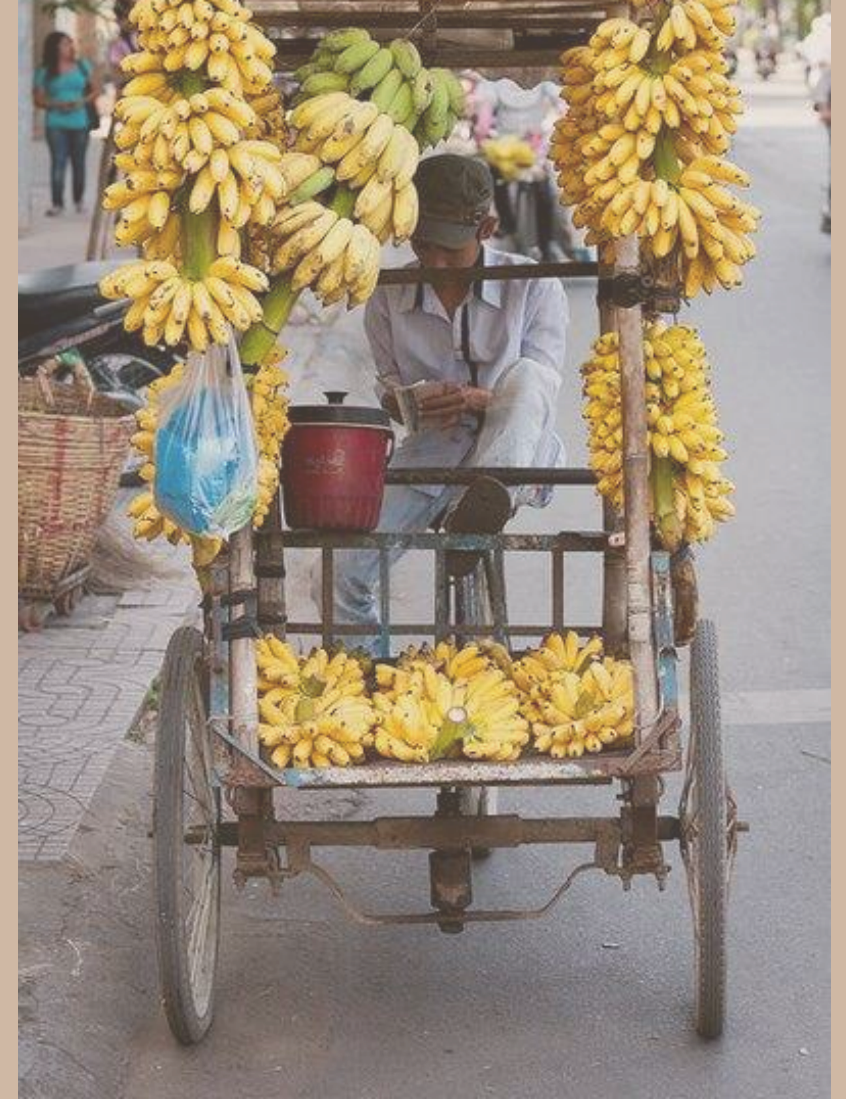
Sumber: Buku Sensus Penduduk 2020, BPS Provinsi DIY 2021

Dinamika kependudukan dan proses pembangunan mempunyai ketertarikan timbal balik karena penduduk merupakan subjek sekaligus objek dalam proses pembangunan. Salah satu data yang penting adalah data mengenai persebaran dan densitas atau kepadatan penduduk yang sangat penting untuk diketahui. Data-data tersebut harus menjadi bagian integral dari rumusan berbagai kebijakan, strategi, dan program pembangunan yang efektif dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

BAB 2

MENGENAL UMKM

(Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)



A. Usaha Mikro

Usaha mikro merupakan usaha yang dikelola oleh individu atau kelompok orang yang belum memiliki izin usaha secara lengkap. Contoh dari usaha skala mikro dan usaha kecil meliputi pedagang kaki lima, kerajinan tangan, usaha souvenir dan sejenisnya.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah.

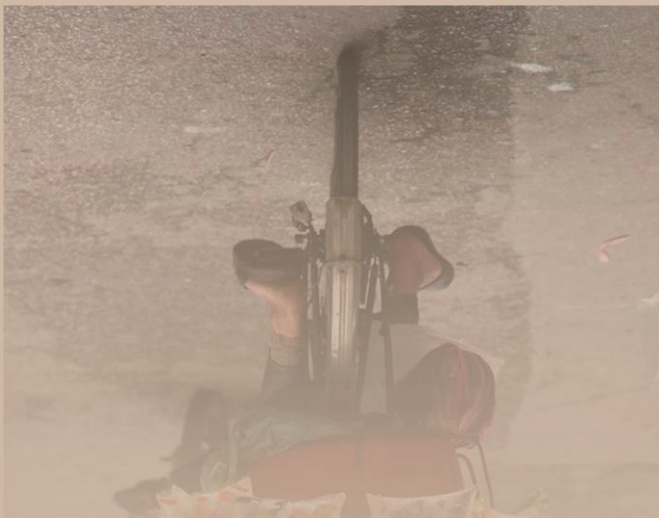
Kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan untuk kriteria hasil penjualan tahunan Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

B. Usaha Kecil

C. Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha dimana usaha tersebut bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan untuk kriteria hasil penjualan tahunan Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).



D. Sektor-Sektor UMKM

Sektor-sektor yang termasuk UMKM menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu meliputi sektor:

1. Pertanian
2. Perdagangan
3. Kelautan dan perikanan
4. Kehutanan
5. Energi dan sumber daya mineral
6. Transportasi
7. Komunikasi
8. Pariwisata
9. Jasa kesehatan
10. Konstruksi
11. Real estate dan usaha persewaan
12. Jasa pendidikan
13. Industri pengolahan
14. Ekonomi kreatif
15. Jasa perorangan yang melayani rumah tangga

E. Peran dan Fungsi UMKM

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai sebagai hal positif dalam memajukan kekuatan ekonomi di Indonesia. Dilihat dari data-data yang ada potensi yang dimiliki oleh UMKM dinilai cukup signifikan.

Keunggulan UMKM dalam bertahan dari badai krisis karena berbagai alasan. Pertama, umumnya UMKM menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, UMKM tidak mengandalkan bahan baku impor dan lebih memanfaatkan sumber daya lokal baik dari sisi sumber daya manusia, modal, bahan baku, maupun peralatannya. Ketiga, umumnya bisnis UMKM menggunakan modal relatif rendah. Dengan keunggulan tersebut, UMKM tidak begitu merasakan pengaruh krisis global yang biasanya ditandai dengan penurunan nilai tukar rupiah yang dalam.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu peran penting dalam perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta. Lebih dari 80% perekonomian di Indonesia terdiri dari UMKM. Dengan jumlah yang sangat besar, UMKM yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta harus terus mengembangkan dan mempertahankan UMKM yang ada dengan cara menciptakan inovasi-inovasi baru.

Berikut beberapa peran penting UMKM:

- UMKM berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mewujudkan pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mewujudkan stabilitas nasional.
- UMKM sangat membantu pemerintah dalam hal menciptakan lapangan kerja baru serta menggunakan tenaga-tenaga baru sehingga nilai pengangguran dapat berkurang.

- UMKM memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar, sehingga UMKM harus mendapatkan perhatian khusus dengan dibantu oleh informasi yang akurat sehingga terwujud bisnis yang terarah antara pelaku usaha dengan elemen daya saing usaha.
- UMKM di Indonesia dapat dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial seperti tingkat kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta masalah urbanisasi. Dari hal itu diharapkan perkembangan UMKM dapat memberikan hal-hal positif serta upaya untuk menghadapi masalah tersebut.

Dengan demikian, adanya UMKM dapat menjadikan perekonomian Indonesia khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi lebih terarah, karena UMKM memiliki fungsi sebagai berikut:

- Kedudukannya sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor
- Penyedia lapangan kerja terbesar
- Pemeran penting dalam mengembangkan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat
- Pencipta pasar baru dengan berbagai sumber inovasi
- Menyumbang dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

F. Kendala UMKM

Faktor Internal



Kurangnya modal

Modal merupakan faktor yang sangat diperlukan untuk mengembangkan suatu usaha. Kurangnya modal dalam pengembangan UMKM karena usaha tersebut merupakan usaha perorangan serta sifatnya yang tertutup. Sehingga menyebabkan terbatasnya modal yang dimiliki oleh si pemilik. Sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga yang lain sulit diperoleh karena banyak persyaratan dan administrasi yang ditetapkan oleh pihak bank namun tidak dapat terpenuhi.



Sumber daya manusia (SDM) yang terbatas

Sebagian besar UMKM merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan SDM dalam berjalannya UMKM dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya yang terbatas. Kurangnya pelatihan serta sosialisasi terhadap UMKM itu sendiri sehingga skill/keterampilan yang diperlukan belum optimal.



Lembaga jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar

UMKM mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dengan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, oleh karena produk itu yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Dalam hal tersebut inovasi sangat mendukung jalannya kinerja pemasaran sebuah perusahaan atau UMKM.

Faktor Eksternal

Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif

Meskipun kebijakan pemerintah untuk menumbuhkan UMKM dari tahun ke tahun terus dikembangkan, namun hasil yang didapatkan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat karena terdapatnya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dengan pengusaha-pengusaha besar.

Terbatasnya sarana dan prasarana usaha

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang dimiliki juga tidak berkembang cepat dan kurang mendukung kemajuan usaha sebagaimana yang diharapkan.

Implikasi otonomi daerah

Berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mengalami implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Disamping itu semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut.

Implikasi perdagangan bebas

Berlakunya AFTA (*Asean Free Trade Area*) pada tahun 2003 dan APEC (*Asia-Pacific Economic Cooperation*) Tahun 2020 yang berimplikasi luas terhadap usaha mikro, kecil dan menengah untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini, UMKM dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global.

Sifat produk dengan *lifetime* pendek

Sifat produk dengan *lifetime* pendek, sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk fasion dan kerajinan dengan *lifetime* yang pendek.

Terbatasnya Akses Pasar

Terbatasnya akses pasar karena adanya kendala transportasi, peraturan maupun perizinan akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional.

Dua pertiga UMK di DIY mengaku memiliki kendala dalam menjalankan usaha. Adanya permasalahan permodalan/likuiditas (sebanyak 49%) dan pesaing (sebanyak 46%) merupakan kendala utama yang dihadapi oleh pengusaha UMK.

BAB 3

UMKM DIY Sebelum Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2019

UMKM DIY

Sebelum Peraturan Gubernur No. 82 Tahun 2019

UMKM adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Mengacu pada pembagian jenis usaha per sektor ekonomi, terdapat 4 pengkategorian jenis usaha yang ada di DIY sebelum PERGUB No. 82 Tahun 2019.

1. Perdagangan
2. Aneka Usaha
3. Pertanian
4. Non Pertanian



Data Jumlah UMKM DIY Menurut Sektor Ekonomi
Sebelum PERGUB No. 82 Tahun 2019



Source : Dataku BAPPEDA DIY



UMKM adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Anggraeni, Hardjanto, & Hayat, 2013). UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. Peranan UMKM dapat dilihat dalam pembentukan PDB sekitar 63,58%, UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 99,45% dan juga sangat besar jumlah unit usaha yang terlibat yakni sekitar 99,84% dari seluruh unit usaha yang ada, sehingga memiliki bagian yang cukup signifikan dalam jumlah nilai ekspor total, yang mencapai 18,72% (Niode, 2009).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sudah dijelaskan secara ringkas mengenai apa itu UMKM. Mulai dari usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

A. UMKM DIY

Sejak krisis moneter tahun 1997, pemulihan ekonomi nasional diselamatkan berkat peranan dari UMKM. UMKM berperan baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan sebagai program pengentasan kemiskinan maupun penyerapan tenaga kerja karena menjadi salah satu alternatif penyediaan lapangan kerja baru. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UMKM hanya menggunakan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya UMKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Kelebihan UMKM di Indonesia adalah kemampuan menyerap tenaga kerja yang masih menganggur dalam jumlah banyak, selain itu UMKM mampu memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang potensial di suatu daerah yang belum diolah secara komersial (Kurniawan & Fauziah, 2014).

Di Indonesia, UMKM memiliki peran yang cukup strategis. Secara umum, UMKM mampu menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Data tahun 2017 menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia mampu menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia. Lebih dari itu, skala kegiatan ekonomi UMKM mampu memberikan kontribusi sekitar 60% terhadap total Pendapatan Domestik Bruto Indonesia. Pada 2017 lalu PDB Indonesia sekitar Rp 13.600 triliun. Dengan demikian, artinya total pendapatan UMKM adalah sekitar Rp 8.160 triliun usaha model bisnis yang baru dengan basis digital guna mencapai efisiensi dan kualitas produk yang lebih baik.

Dalam konteks regional DIY, UMKM masih menjadi penopang utama dari perekonomian Yogyakarta. Data tahun 2017 menunjukkan bahwa kontribusi UMKM terhadap perekonomian Yogyakarta mencapai 98,4%. Sementara itu UMKM mampu menyerap 79% dari total lapangan kerja. Serupa dengan potret nasional, UMKM di DIY juga mampu menyerap cukup banyak tenaga kerja yang ada.

Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar, budaya, pariwisata, dan kota kreatif. Banyak objek-objek wisata seperti wisata alam, sejarah, budaya, pendidikan, dan lain-lain yang terdapat di kota ini. Selain itu banyak juga industri-industri kreatif yang berkembang sebagai pelengkap wisata. Objek-objek wisata dan hasil industri kreatif berupa oleh-oleh tersebut menjadi magnet yang kuat bagi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Tingginya wisatawan memicu tumbuhnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data statistik Bappeda DIY menunjukkan peningkatan jumlah UMKM di Yogyakarta dari tahun ke tahun, mulai tahun 2016 sebanyak 226.211 UMKM menjadi 302.799 pada tahun 2021. Selain karena jumlah objek wisata di Yogyakarta yang semakin bertambah, peningkatan ini juga didukung banyaknya industri kreatif yang menyajikan berbagai variasi oleh-oleh khas jogja seperti souvenir, kerajinan sulam dan batik yang membuat masyarakat pada umumnya dan remaja pada khususnya semakin tertarik untuk berwisata.

Yogyakarta terkenal dengan kreatifitasnya. Salah satu oleh-oleh khas Yogyakarta adalah Batik. Batik merupakan salah satu budaya Indonesia yang mulai mendunia, dan telah dipatenkan menjadi produk seni budaya Indonesia pada tahun 2009 oleh UNESCO. Selain batik, oleh-oleh hasil kreatifitas juga banyak berkembang sebagai industri rumah tangga seperti Sulam dan Karikatur. Industri kreatif ini merupakan suatu peluang usaha yang patut dilirik di tengah maraknya ide usaha dagang yang beragam. Ditambah lagi dengan Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar, budaya, pariwisata dan kreatif membuat pasar dari penjualan produk-produk kreatif ini menjadi lebih luas dan terjangkau karena mayoritas penggemar produk-produk ini adalah wisatawan domestik maupun mancanegara.

B. Mengenal Sektor-Sektor UMKM

Perdagangan

Perdagangan sendiri berarti suatu aktivitas atau kegiatan jual dan beli antara produsen dan konsumen yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan dapat memenuhi kebutuhan bersama. Perdagangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Usaha yang masuk dalam sektor perdagangan adalah segala usaha dengan aktivitas jual beli suatu barang.

Aneka usaha

Aneka usaha merupakan seluruh kegiatan ekonomi bisnis manusia yang tujuannya untuk mencari keuntungan guna untuk mencukupi kebutuhan dalam sehari-hari selain sektor lainnya yaitu perdagangan, pertanian dan yang lain. Contoh aneka usaha lain ialah : Laundry, Cuci Motor & Mobil, Pembayaran Tagihan Online, Reseller Produk.

Industri pertanian

Pertanian merupakan suatu jenis kegiatan produksi yang berlandaskan pada proses pertumbuhan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan sedangkan industri merupakan semua usaha yang melakukan kegiatan merubah bahan dasar atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Jadi industri pertanian yaitu kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Contohnya berikut ini:

- Pengolahan tanaman perkebunan meliputi tebu, kopi, teh, karet, kelapa, cengkih dll.
- Pengolahan peternakan mencakup pengolahan daging segar, susu, kulit, dan hasil samping lainnya.
- Pengolahan tanaman hasil hutan meliputi produk kayu olahan dan non kayu seperti damar, rotan, tengkawang dll.

Industri non pertanian

Industri non pertanian merupakan pemanfaatan hasil dari kegiatan selain usaha di bidang pertanian. Contohnya berikut ini: Industri pertambangan dan energi, Industri elektronika, Industri pariwisata.

C. Jumlah UMKM DIY Menurut Kategori

Menurut hasil Sensus Ekonomi 2016 Listing, jumlah usaha UMKM mencapai lebih dari 524,9 ribu usaha atau 98,36% dari total usaha nonpertanian di DIY. Usaha ini juga mampu menyerap tenaga kerja DIY lebih dari 1.044 ribu orang atau sekitar 78,98% dari total tenaga kerja nonpertanian. Hal tersebut menunjukkan bahwa dunia usaha di DIY masih didominasi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sejak krisis menerpa Indonesia pada tahun 1997-1998 kondisi UMKM DIY yang meliputi perdagangan, aneka usaha, pertanian, dan non pertanian terbukti masih bertahan disaat usaha usaha besar lainnya terpuruk.

Mengacu pada pembagian jenis usaha per sektor ekonomi, terdapat 4 pengkategorian jenis usaha yang ada di DIY sebelum Peraturan Gubernur No. 82 Tahun 2019. Pembagian tersebut meliputi Perdagangan, Aneka Usaha, Industri Pertanian, dan Industri Non Pertanian.

Tabel 3. 1. Jumlah UMKM di DIY Tahun 2018

Kategori	Jumlah Usaha Mikro (Unit)	Jumlah Usaha Kecil (Unit)	Jumlah Usaha Menengah (Unit)
Perdagangan	40.436	18.506	11.178
Aneka Usaha	31.069	14.175	8.561
Industri Pertanian	36.653	16.752	10.118
Industri Non Pertanian	33.833	15.463	9.339
Jumlah	141.991	64.896	39.196

Sumber: Dataku Bappeda DIY

Data tahun 2019 tersebut memaparkan pada usaha mikro, jumlah usaha terbanyak ada pada industri perdagangan sekitar 40 ribu unit usaha. Sedangkan jumlah aneka usaha lainnya memiliki jumlah paling sedikit yaitu 31 ribu lebih unit usaha.

Sama dengan usaha mikro, pada usaha kecil, jumlah usaha terbanyak ada pada sektor perdagangan yang hampir mencapai angka 19 ribu unit usaha. Sedangkan jumlah usaha pada Aneka Usaha memiliki jumlah paling sedikit yaitu 14 ribu lebih unit usaha.

Masih sama dengan kedua jenis usaha diatas, pada usaha menengah jumlah usaha terbanyak ada pada sektor Perdagangan yaitu 11 ribu lebih unit usaha. Sedangkan jumlah usaha pada Aneka Usaha memiliki jumlah paling sedikit yaitu 8 ribu lebih unit usaha.

Tabel 3. 2. Jumlah UMKM di DIY Tahun 2019

Kategori	Jumlah Usaha Mikro (Unit)	Jumlah Usaha Kecil (Unit)	Jumlah Usaha Menengah (Unit)
Perdagangan	40.834	14.314	8.645
Aneka Usaha	31.374	18.688	11.288
Industri Pertanian	37.012	16.916	10.218
Industri Non Pertanian	34.165	15.615	9.430
Jumlah	143.385	65.533	39.581

Sumber: Dataku Bappeda DIY

Data tahun 2019 tersebut memaparkan pada usaha mikro, jumlah usaha terbanyak ada pada industri perdagangan yang hampir mencapai angka 41 ribu unit usaha. Sedangkan jumlah aneka usaha lainnya memiliki jumlah paling sedikit yaitu 31 ribu lebih unit usaha.

Berbeda dengan usaha mikro, pada usaha kecil, jumlah usaha terbanyak ada pada sektor aneka usaha yang hampir mencapai angka 19 ribu unit usaha. Sedangkan jumlah usaha pada industri perdagangan memiliki jumlah paling sedikit yaitu 14 ribu lebih unit usaha.

Seperti pada usaha kecil, pada usaha menengah jumlah usaha terbanyak ada pada sektor aneka usaha yaitu 11 ribu lebih unit usaha. Sedangkan jumlah usaha pada industri perdagangan memiliki jumlah paling sedikit yaitu 8 ribu lebih unit usaha.

D. Jumlah Tenaga Kerja UMKM di DIY Tahun 2018 – 2019

Berdasarkan data BPS Provinsi DIY tahun 2018, tingkat pengangguran terbuka di DIY sebesar 3,35% sedangkan pada tahun 2019 yaitu 3,14%. Pengangguran didominasi oleh lulusan Universitas yang mencapai angka 6%. Tingginya angka pengangguran yang berasal dari lulusan Universitas, menjadikan UMKM sebagai ladang usaha. Pengangguran banyak terjadi pada lulusan SMA dan SMK sebesar 4,4%. Hal ini mengindikasikan bahwa pengangguran di DIY adalah pengangguran terdidik, sehingga memberikan peluang cukup besar bahwa UMKM menjadi ladang usaha inovasi dan kreativitas. Pada data Sensus Ekonomi 2016 memberikan informasi bahwa UMKM telah menyerap sekitar 82,1% tenaga kerja nonpertanian di DIY. Berikut adalah data jumlah tenaga kerja UMKM di DIY pada tahun 2018.

Tabel 3.3. Jumlah Tenaga Kerja UMKM di DIY Tahun 2018

Jenis Pekerja	Jumlah Usaha Mikro (Unit)	Jumlah Usaha Kecil (Unit)	Jumlah Usaha Menengah (Unit)	Jumlah
Laki-Laki	53.018	75.596	76.183	204.797
Perempuan	90.004	94.601	95.228	279.833
Jumlah	143.022	170.197	171.411	484.630

Sumber: Dataku Bappeda DIY

Dapat diketahui bahwa tahun 2018 jenis pekerja terbanyak yaitu pekerja perempuan dibandingkan dengan pekerja laki-laki, yaitu kurang lebih 280 ribu tenaga kerja, dengan total jumlah tenaga kerja secara keseluruhan yaitu 484.630 tenaga kerja.

Tabel 3. 4. Jumlah Tenaga Kerja UMKM di DIY Tahun 2019

Jenis Pekerja	Jumlah Usaha Mikro (Unit)	Jumlah Usaha Kecil (Unit)	Jumlah Usaha Menengah (Unit)	Jumlah
Laki-Laki	53.539	76.338	77.931	207.808
Perempuan	90.888	95.530	95.163	281.581
Jumlah	144.427	171.868	173.094	489.389

Sumber: Dataku Bappeda DIY

Dapat diketahui bahwa tahun 2019 jenis pekerja terbanyak yaitu pekerja perempuan dibandingkan dengan pekerja laki-laki, yaitu kurang lebih 282 ribu pekerja.

Dari data yang diperoleh tersebut memberikan kesimpulan bahwa, tenaga kerja UMKM sebanyak 489.389 orang pada 2019. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 484.630 orang.

Secara rinci, tenaga kerja pada tahun 2018 di usaha mikro tercatat sebanyak 143.022, tenaga kerja berasal dari usaha kecil sebanyak 170.197. Kemudian tenaga kerja berasal dari usaha menengah sebanyak 171.411. Sedangkan tenaga kerja pada tahun 2020 tercatat bahwa usaha mikro sebanyak 144.427, tenaga kerja dari usaha kecil sebanyak 171.868. Sedangkan usaha menengah sebanyak 173.094.

Proporsinya mencapai 3,07% dari total tenaga kerja di Indonesia. Adapun, total UMKM di Indonesia tercatat sebanyak 65,47 juta unit. Jumlah tersebut mencapai 99,99% dari total unit usaha di Indonesia. UMKM menyumbangkan 60,51% terhadap produk domestik bruto (PDB) atas harga berlaku. Terhadap PDB atas harga konstan, kontribusi UMKM mencapai 57,14%.

BAB 4

UMKM DIY Setelah Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2019

UMKM DIY

Setelah Peraturan Gubernur No. 82 Tahun 2019

Pembagian jenis usaha setelah PP mengalami perubahan. Terdapat 15 pengkategorian UMKM yang ada di DIY sesudah PERGUB No. 82 Tahun 2019. Pembagian sektor menurut PERGUB No. 82 Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Sektor pertanian
2. Sektor perdagangan
3. Sektor kelautan dan perikanan
4. Sektor kehutanan
5. Sektor energi dan sumber daya mineral
6. Sektor transportasi
7. Sektor komunikasi
8. Sektor pariwisata

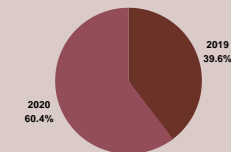


9. Sektor jasa kesehatan
10. Sektor konstruksi
11. Sektor real estate, usaha persewaan
12. Sektor jasa pendidikan
13. Sektor industri pengolahan
14. Ekonomi kreatif
15. Jasa perorangan yang melayani rumah tangga

Data Jumlah UMKM DIY Tahun 2020 Menurut Sektor Ekonomi Setelah Peraturan Gubernur No. 82 Tahun 2019

Sektor Ekonomi	Usaha Mikro (Unit)	Usaha Kecil (Unit)	Usaha Menengah (Unit)
Sektor Pertanian	20492	6428	3342
Sektor Perdagangan	31476	9873	5133
Sektor Kelautan dan Perikanan	703	221	115
Sektor Kehutanan	16	3	3
Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	52	16	8
Sektor Transportasi	4528	1420	738
Sektor Komunikasi	56	17	9
Sektor Pariwisata	340	107	55
Sektor Jasa Kesehatan	92	29	15
Sektor Konstruksi	454	142	74
Sektor Real Estate, Usaha Persewaan	346	109	56
Sektor Jasa Pendidikan	125	39	20
Sektor Industri Pengolahan	116160	36435	18944
Ekonomi Kreatif	11507	3610	1877
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	1686	529	275

Perbedaan UMKM DIY Sebelum dan Setelah PERGUB No. 82 Tahun 2019 menurut Omset Tahunan 2019-2020



Kenaikan dan penurunan omset tahunan terjadi karena dampak dari perbedaan jumlah pembagian jenis usaha tahun 2019 sebanyak 4 jenis usaha menjadi 15 jenis usaha pada tahun 2020. Selain itu, pembagian yang lebih banyak dan terperinci menyebabkan jumlah usaha yang dicakup semakin luas dan nilai omset tahunan yang dimiliki cenderung meningkat/konstan/sedikit penurunan.



A. Alasan Perubahan Pengkategorian Jumlah Usaha per Sektor Ekonomi

Mengingat bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menopang pertumbuhan dan ketahanan ekonomi wilayah, serta mendominasi jumlah tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta maka pemerintah daerah Provinsi Yogyakarta ingin meningkatkan keakuratan dan keselarasan data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta, diperlukan suatu sistem pengelolaan data. Sistem pengelolaan data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tersebut bertujuan meningkatkan keakuratan dan keselarasan harus terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk mewujudkan data yang akurat, terkini dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan.

Tujuan tersebut didorong dengan pembagian jenis usaha per sektor ekonomi yang lebih terperinci, akurat, dan selaras dari 4 jenis sektor usaha menjadi 15 jenis sektor usaha. Jumlah pembagian yang lebih banyak mempermudah data untuk dikenali, dibandingkan, dan dipelajari.

B. Sektor UMKM Setelah Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2019

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Sektor adalah lingkungan suatu usaha. Setelah dilakukannya perubahan peraturan daerah pada pembagian jenis usaha per sektor ekonomi, terdapat 15 pengkategorian UMKM yang ada di DIY setelah PP Nomor 7 Tahun 2021. Pembagian sektor menurut Peraturan Gubernur No. 82 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 meliputi:

1. Sektor Pertanian

Sektor pertanian adalah jenis usaha yang berhubungan dengan pertanian. Pertanian sendiri memiliki arti suatu jenis kegiatan produksi yang berlandaskan pada proses pertumbuhan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Pembangunan pertanian telah memberikan sumbangan besar dalam pembangunan nasional. Sektor pertanian merupakan sektor yang dapat diandalkan dalam pemulihan perekonomian nasional, mengingat sektor pertanian terbukti masih dapat memberikan kontribusi pada perekonomian nasional walaupun badai krisis menerpa. Hal ini dikarenakan terbukanya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian dan tingginya sumbangan devisa yang dihasilkan (Badan Pusat Statistik, 2004). Usaha yang masuk dalam sektor pertanian antara lain:

- Menjual pupuk tanaman.
- Menjual hasil rempah-rempah/hasil pertanian.
- Menjual menjual alat pertanian, dan lain sebagainya

2. Sektor Perdagangan

Perdagangan sendiri berarti suatu aktivitas atau kegiatan jual dan beli antara produsen dan konsumen yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan dapat memenuhi kebutuhan bersama. Perdagangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Usaha yang masuk dalam sektor perdagangan adalah segala usaha dengan aktivitas jual beli suatu barang.

3. Sektor Kelautan dan Perikanan

Secara geografis, bagian selatan DIY berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Hal tersebut menyebabkan banyak penduduk di pesisir pantai selatan memanfaatkan sumberdaya alam laut sebagai mata pencaharian. Selain itu pembudidayaan ikan air tawar juga banyak dilakukan oleh penduduk yang tinggal di dekat danau atau waduk yang tersebar di DIY. Beberapa usaha yang masuk dalam sektor kelautan dan perikanan adalah nelayan dan petani ikan.

4. Sektor Kehutanan

Lebih dari setengah wilayah Indonesia adalah hutan, membuat Indonesia menduduki urutan kedelapan negara dengan hutan terluas di dunia pada tahun 2020. Pada data BAPPEDA DIY menunjukkan bahwa wilayah hutan di DIY terus meningkat. Peningkatan itu didominasi oleh luasan hutan rakyat, terutama pada wilayah Gunungkidul yang dikenal sebagai basis wilayah hutan (hutan negara maupun hutan rakyat) di DIY. Hutan di DIY kebanyakan dijadikan sebagai objek wisata. Hutan Pinus Mangunan misalnya. Usaha yang memiliki sangkut paut dengan kehutanan termasuk usaha dalam sektor kehutanan.

5. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Energi dan sumber daya mineral pada dasarnya kebutuhan yang tidak dapat dihindari di dunia, bensin misalnya. Jenis usaha pada sektor ini juga termasuk menguntungkan. Di Yogyakarta sendiri pengguna kendaraan setiap tahunnya terus bertambah karena banyak wisatawan lokal maupun mancanegara mengunjungi Yogyakarta.

6. Sektor Transportasi

Sektor transportasi merupakan salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan penumpang yang telah berkembang sangat dinamis serta berperan di dalam menunjang pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Pertumbuhan sektor ini akan mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara langsung sehingga transportasi mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis. Contoh sektor jasa transportasi yaitu jasa pengangkutan barangan dan jasa transportasi perjalanan

7. Sektor Komunikasi

Sektor komunikasi merupakan sektor yang bertugas untuk proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaan tanda, simbol, dan aturan semiotika yang dipahami bersama. Contoh sektor komunikasi yaitu:

- Menginformasikan karyawan tentang fungsi pekerjaan
- Membujuk atau mempengaruhi klien dan mitra bisnis untuk bekerjasama dengan perusahaan.
- Memotivasi karyawan untuk membuat keputusan yang lebih baik
- Bersosialisasi dengan orang-orang di dalam organisasi

8. Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Contoh sektor pariwisata yaitu:

- Usaha di bidang penginapan
- Usaha di bidang kuliner
- Usaha di bidang pemandu wisata
- Usaha di bidang penerjemah bahasa
- Usaha di bidang penyewaan kendaraan
- Usaha di bidang penyewaan alat dan perlengkapan
- Usaha di bidang penyewaan lahan parkir

9. Sektor Konstruksi

Sektor jasa konstruksi merupakan salah satu sektor strategis dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional. Jasa konstruksi sesungguhnya merupakan bagian penting dari terbentuknya produk konstruksi, karena jasa konstruksi menjadi arena pertemuan antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. Contoh sektor jasa konstruksi yaitu:

- Pengerjaan pembangunan gedung
- Pengerjaan proyek jalan tol
- Pengerjaan pembangunan waduk

10. Sektor Konstruksi

Sektor jasa konstruksi merupakan salah satu sektor strategis dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional. Jasa konstruksi sesungguhnya merupakan bagian penting dari terbentuknya produk konstruksi, karena jasa konstruksi menjadi arena pertemuan antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. Contoh sektor jasa konstruksi yaitu:

- Pengerjaan pembangunan gedung
- Pengerjaan proyek jalan tol
- Pengerjaan pembangunan waduk

11. Sektor Real Estate dan usaha persewaan

Meliputi usaha konstruksi penjualan, persewaan dari pengoperasian real estate baik yang dimiliki sendiri maupun yang disewa, seperti: bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal termasuk juga pengembangan dan penjualan tanah dan kuburan, pengoperasian apartemen-apartemen hotel dan kawasan tempat tinggal yang bisa dipindah-pindah. Pembelian, penjualan, persewaan, dan penafsiran nilai tanah/bangunan yang dilakukan agen real estate atau broker dimasukkan dalam jenis usaha ini.

- Persewaan alat transportasi darat dan peralatannya
Meliputi usaha jasa persewaan semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti: mobil, truk, mobil derek, sepeda motor dan caravans, termasuk usaha persewaan containers.
- Persewaan alat transportasi air dan peralatannya
Meliputi usaha jasa persewaan alat transportasi air tanpa operatornya, seperti: motor boat/kapal.
- Persewaan alat transportasi udara dan peralatannya
Meliputi usaha jasa persewaan alat transportasi udara tanpa operatornya, seperti: pesawat terbang.
- Persewaan mesin pertanian dan peralatannya
Meliputi usaha jasa persewaan mesin dan peralatannya/perlengkapannya (tanpa operator) untuk keperluan pertanian.
- Persewaan mesin konstruksi dan teknik sipil dan peralatannya
Meliputi usaha jasa persewaan mesin dan peralatan/perlengkapannya (tanpa operator) untuk keperluan konstruksi dan teknik sipil.
- Persewaan mesin kantor dan peralatannya termasuk komputer
Meliputi usaha jasa persewaan semua jenis mesin kantor dan peralatannya, seperti: mesin tik, mesin akuntansi, mesin hitung, mesin photo copy dan mesin pengolah data tanpa operator.
- Persewaan mesin lainnya
Meliputi usaha jasa persewaan semua jenis peralatannya/perlengkapannya lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, dan secara umum digunakan sebagai barang modal, seperti: mesin pembangkit listrik, mesin tekstil, mesin pengolah/pengerjaan logam/kayu, mesin percetakan, dan mesin las listrik.

12. Sektor Jasa Pendidikan

Pendidikan adalah modal penting bagi perkembangan tiap generasi pada sebuah negara. Karena begitu pentingnya pendidikan serta masih kurangnya sarana pendidikan yang ada di negara kita ini, maka hal ini bisa menjadi peluang usaha yang bisa dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki keterampilan atau keahlian di bidang tertentu. Di zaman yang semakin canggih, berbagai hal bisa dijadikan peluang usaha menjanjikan yang dapat menghasilkan banyak pundi-pundi rupiah, termasuk di bidang pendidikan. Oleh karena itu, kebutuhan akan pendidikan akan terus diminati oleh banyak orang.

- Buku

Buku adalah jendela dunia, semua orang pasti setuju dengan ungkapan tersebut. Dengan membaca buku, kita dapat membuka dan memperluas wawasan. Karena itu, buku digunakan sebagai media pembelajaran yang wajib ada dalam melaksanakan proses belajar mengajar.

Dalam sektor pendidikan, hal yang dapat dimanfaatkan salah satunya yaitu menjual berbagai aneka jenis buku, mulai dari buku pelajaran, novel, komik dan lain sebagainya. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu menjalin kerjasama dengan penerbit atau distributor untuk memasok buku yang akan dijual di pasaran.

Untuk memasarkan buku, dapat menggunakan sarana toko *online* di berbagai *marketplace* maupun di media sosial agar dapat lebih mudah ditemukan oleh banyak orang.

- Alat tulis

Dalam sektor pendidikan juga dapat memanfaatkan peluang anak sekolah maupun mahasiswa yang membutuhkan alat tulis dengan membuka bisnis alat tulis atau stationery. Bahkan dengan menjual berbagai alat tulis, hal yang terjadi biasanya tak hanya memiliki pelanggan dari pihak pelajar saja, tapi juga pekerja kantoran yang selalu membutuhkan alat tulis untuk bekerja. Berbagai kebutuhan alat tulis untuk pelajar dan pekerja yang dapat dijual seperti pensil, penghapus, buku tulis, pulpen, penggaris dan lainnya. Semakin lengkap produk yang dijual seperti memiliki jenis barang yang bervariasi dari segi merek, kualitas maupun harga, maka akan semakin besar pula minat konsumen yang ingin berbelanja di toko yang sudah dibuat. Dalam hal ini kita bisa membuka toko offline kecil-kecilan di dekat sekolah atau kampus dan secara berbarengan kamu juga dapat membuka toko online agar mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal.

- Seragam Sekolah

Untuk menempuh pendidikan di Indonesia, setiap peserta didik mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) diharuskan untuk menggunakan seragam sekolah. Bahkan setiap siswa dan siswi memiliki lebih dari satu seragam sekolah karena digunakan setiap hari. Oleh karena itu, bisnis seragam sekolah bisa menjadi bisnis yang sangat menjanjikan untuk dijalankan. Bukan hanya seragam saja, tetapi juga bisa menjual keperluan sekolah lainnya seperti seragam pramuka, topi, dasi, tas dan lain sebagainya. Semakin variatif jenis seragam sekolah yang dijual, maka semakin tinggi pula peluang bisnis yang dapat berlangsung lama karena toko yang dibuat dapat menyediakan kebutuhan seragam secara lengkap.

- Les Privat

Bukan hanya produk di bidang pendidikan yang bisa dijadikan ladang uang, namun dapat juga kita membuka bisnis les privat pelajaran seperti bahasa inggris, matematika, komputer dan lain-lain. Pasalnya, banyak sekali pelajar yang membutuhkan pelajaran tambahan di luar jam sekolah untuk menambah ilmu pengetahuannya.

Membuka bisnis les privat juga tidak membutuhkan modal yang besar tapi bisa menghasilkan pendapatan yang cukup besar. Karena hanya memerlukan pengetahuan yang luas dan waktu yang cukup. Bisnis pendidikan yang satu ini juga bisa dilakukan oleh mahasiswa yang memang memiliki keahlian di bidang mata pelajaran tertentu. Bisnis ini dapat dimulai dengan menawarkan ke kerabat terdekat dan juga memasarkan lewat internet.

- Peluang usaha kursus atau bimbel

Bimbel atau kursus juga menjadi salah satu peluang usaha di sektor pendidikan yang sangat menjanjikan. Karena bimbel dapat membantu para pelajar untuk memahami materi pelajaran yang dianggap sulit. Dengan begitu, anak-anak yang ikut bimbel diharapkan dapat lebih berprestasi di sekolah. Tak heran kalau banyak orangtua yang rela merogoh kocek ekstra untuk mendaftarkan anaknya di tempat kursus. Selain itu, kini sudah banyak tempat bimbel yang menawarkan bimbingan belajar secara *online* terutama di masa pandemi seperti saat ini dan didukung dengan perkembangan teknologi yang sudah semakin canggih.

13. Sektor Industri Pengolahan

Industri pengolahan meliputi berbagai kegiatan produksi yang mengubah bentuk bahan baku/mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang siap digunakan atau dikonsumsi. Misalnya industri kain yang mengubah kapas menjadi kain; atau industri konveksi yang mengubah bentuk kain menjadi berbagai jenis pakaian; atau industri minuman dalam kemasan yang mengubah berbagai jenis buah menjadi minuman jus di dalam botol yang siap dikonsumsi. Adapun di kategori Industri Pengolahan ini (manufaktur), terdapat sekitar 3.4 juta pelaku UMKM (BPS, 2015), yang mayoritas bergerak di 5 bidang Industri, yaitu Makanan dan Minuman (44.9%); Kerajinan Kayu dan anyaman (19.9%); Tekstil dan pakaian jadi (14.4%); Barang galian bukan logam seperti industri tepung, mika, dll (6.9%); dan furniture (3.5%).

14. Sektor Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif merupakan proses untuk menciptakan sebuah karya berdasarkan ide yang dicetuskan berkat kreatifitas dari seseorang atau sekelompok orang. Ekonomi kreatif ini juga tidak mengeksploitasi sumber daya alam yang ada dan memberikan lapangan kerja yang baru. Maka dari itu ekonomi kreatif adalah sumber perekonomian yang mengutamakan kreativitas dan pengetahuan manusia yang tidak terbatas untuk dimanfaatkan sebagai faktor produksi. Era teknologi sangat menguntungkan bagi sektor ekonomi untuk tumbuh.

Tahun 2018, tercatat bahwa industri/ekonomi kreatif memberikan kontribusi sebesar 7,44% terhadap total perekonomian nasional Indonesia. Selain bermanfaat bagi pemasukan ekonomi negara, industri ini juga menjadi wadah untuk menumbuhkembangkan kreativitas bagi pendiri bisnis dan juga pekerjanya, serta solusi bagi banyaknya jumlah tenaga kerja usia produktif di Indonesia, sekaligus membantu mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Peran signifikan ekonomi kreatif bagi perekonomian Indonesia dapat dilihat dari berdirinya Bekraf yang menaungi ekonomi kreatif di Indonesia. Terdapat 16 subsektor dalam ekonomi kreatif, yaitu: kuliner, fashion, kriya, TV dan radio, penerbitan, arsitektur, aplikasi dan games developer, periklanan, musik, fotografi, film, animasi, video, seni pertunjukkan, desain produk, seni rupa, desain interior, dan desain komunikasi visual.

Contoh usaha di sektor ekonomi kreatif :

- **Kuliner**
Kuliner termasuk dalam jajaran ekonomi kreatif yang sangat diminati saat ini. Mulai dari sektor skala mikro sampai skala besar, sektor kuliner cukup menguasai pasar dan jumlahnya pun terus bertambah.
- **Fashion**
Salah satu industri yang tidak ada matinya adalah industri fashion. Saat ini Negara Indonesia menjadi salah satu pusat fashion yang cukup besar. Memiliki pasar fashion yang menarik dan luar biasa, seperti Tanah Abang yang memiliki transaksi ratusan hingga milyaran setiap harinya menjadi industri ekonomi kreatif yang cukup signifikan.
- **Kriya (Kerajinan tangan)**
Kerajinan tangan merupakan salah satu sektor industri yang cukup lama di Indonesia. Seni kriya menjadi salah satu sektor khas Indonesia. Kerajinan yang dihasilkan dapat menjadi produk-produk kreatif yang cukup digemari. Konsumen dari produk kerajinan tangan ini tidak hanya warga negara Indonesia, melainkan juga warga negara asing.
- **Desain**
Desain disini terdiri dari beberapa sektor yang menunjang kreativitas. Seperti desain grafis, desain interior, desain produk, dan berbagai jenis desain lainnya.
- **Periklanan**
Periklanan merupakan industri yang membutuhkan ide-ide kreatif untuk menghasilkan produk periklanan yang cukup menarik banyak orang.
- **Musik**
Industri musik menjadi salah satu sektor bisnis yang mengandalkan kreativitas. Musik juga menjadi industri yang banyak diminati oleh anak muda dalam menuangkan kreativitas out of the box mereka.
- **Game**
Sudah banyak game-game yang dibuat oleh anak-anak Indonesia. Bahkan beberapa game buatan anak Indonesia sudah mendunia. Membuat industri game menjadi sektor ekonomi kreatif yang cukup berkembang di Indonesia saat ini.

- **Arsitektur**
Bidang arsitektur juga masuk dalam jajaran ekonomi kreatif. Industri arsitektur bukan hanya industri desain rumah, didalamnya termasuk perencanaan kota, teknik sipil, pengembangan taman, dan masih banyak lagi.
- **Aplikasi**
Perkembangan teknologi dan informasi mendorong anak muda Indonesia membuat aplikasi dalam mendorong kebutuhan hidup. Sektor aplikasi masuk dalam jajaran bisnis ekonomi kreatif. Saat ini peminat di bidang aplikasi cukup banyak dan terus tumbuh.
- **Animasi, film, dan Video**
Pembuatan animasi, film, dan video membutuhkan kreatifitas besar untuk menghasilkan satu kontennya. Mulai dari awal pembuatan hingga akhir, semua membutuhkan ide dan gagasan besar dalam menghasilkan karya luar biasa.
- **Penerbitan dan percetakan**
Untuk mendesain sebuah buku, perusahaan penerbit harus menciptakan hasil terbitan yang menarik. Sektor penerbitan dan percetakan memiliki andil besar dalam menghasilkan karya-karya unik dan menarik.
- **Seni pertunjukan**
Industri seni pertunjukan sudah ada sejak lama di indonesia. Seni pertunjukan merupakan hiburan masyarakat Indonesia sejak dahulu. Seni pertunjukan terdiri dari wayang, teater, tari, dan lain sebagainya.
- **Televisi dan radio**
Dunia televisi dan radio masuk dalam jajaran ekonomi kreatif, karena program televisi dan radio memerlukan ide dan kreativitas dalam proses pembuatan hingga penyajian ke masyarakat.

15. Sektor Perorangan yang Melayani Rumah Tangga

Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga adalah kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan. Kegiatan rumah tangga sebagai pemberi kerja yang mempekerjakan personil rumah tangga, seperti asisten rumah tangga, juru masak, pelayan, kepala pelayan, tukang cuci, tukang kebun, penjaga gerbang, penjaga kandang, sopir, penjaga rumah, pengajar anak-anak di rumah tangga, pengasuh anak, sekretaris dan sebagainya.

C. Jumlah UMKM di DIY Menurut Sektor

Berikut adalah tabel per sektor usaha berdasarkan data setelah Peraturan Gubernur No. 82 Tahun 2019, yaitu:

Tabel 4. 1. Jumlah UMKM per Sektor Ekonomi di DIY Tahun 2020

Kategori	Jumlah Usaha Mikro (Unit)	Jumlah Usaha Kecil (Unit)	Jumlah Usaha Menengah (Unit)
Sektor Pertanian	20.492	6.428	3.342
Sektor Perdagangan	31.476	9.873	5.133
Sektor Kelautan dan Perikanan	703	221	115
Sektor Kehutanan	16	5	3
Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	52	16	8
Sektor Transportasi	4.528	1.420	738
Sektor Komunikasi	56	17	9
Sektor Pariwisata	340	107	55
Sektor Jasa Kesehatan	92	29	15
Sektor Kontruksi	454	142	74
Sektor Real Estate, Usaha Persewaan	346	109	56
Sektor Jasa Pendidikan	125	39	20
Sektor Industri Pengolahan	116.160	36.435	18.944
Ekonomi Kreatif	11.507	3.610	1.877
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	1.686	529	275

Sumber: Dataku Bappeda DIY

Pada usaha mikro dengan jumlah usaha tertinggi berada pada sektor industri pengolahan sebanyak 116.160 unit dan terendah berada pada sektor kehutanan sebanyak 16 unit. Pada usaha kecil dengan jumlah usaha tertinggi berada pada sektor industri pengolahan sebanyak 36.435 unit dan terendah berada pada sektor kehutanan sebanyak 5 unit. Pada usaha menengah dengan jumlah usaha tertinggi berada pada sektor industri pengolahan sebanyak 18.944 unit dan terendah berada pada sektor kehutanan sebanyak 3 unit.

Pada usaha mikro dengan jumlah usaha tertinggi berada pada sektor industri pengolahan sebanyak 209.343 unit dan terendah berada pada sektor kehutanan sebanyak 12 unit. Pada usaha kecil dengan jumlah usaha tertinggi berada pada sektor industri pengolahan sebanyak 4.623 unit dan terendah berada pada sektor kehutanan sebanyak 1 unit. Pada usaha menengah dengan jumlah usaha tertinggi berada pada sektor industri pengolahan sebanyak 432 unit dan terendah berada pada sektor kehutanan sebanyak 1 unit.

Tabel 4. 2. Jumlah UMKM per Sektor Ekonomi di DIY Tahun 2021

Kategori	Jumlah Usaha Mikro (Unit)	Jumlah Usaha Kecil (Unit)	Jumlah Usaha Menengah (Unit)
Sektor Pertanian	1.256*	316*	21*
Sektor Perdagangan	45.328*	7.525*	1.088*
Sektor Kelautan dan Perikanan	825*	25*	5*
Sektor Kehutanan	12*	1*	1*
Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	53*	40*	4*
Sektor Transportasi	6.560*	89*	21*
Sektor Komunikasi	90*	20*	6*
Sektor Pariwisata	124*	20*	2*
Sektor Jasa Kesehatan	131*	52*	23*
Sektor Kontruksi	513*	136*	50*
Sektor Real Estate, Usaha Persewaan	624*	202*	46*
Sektor Jasa Pendidikan	179*	31*	2*
Sektor Industri Pengolahan	209.343*	4.623*	432*
Ekonomi Kreatif	10.834*	938*	119*
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	8.751*	2.048*	290*

Keterangan: Tanda *) menandakan data bersifat sangat sementara.

Sumber: Dataku Bappeda DIY

D. Jumlah Tenaga Kerja UMKM

Berikut adalah tabel jumlah tenaga kerja UMKM di DIY tahun 2020 dan 2021 berdasarkan data setelah Peraturan Gubernur No. 82 Tahun 2019, yaitu:

Tabel 4. 3. Jumlah Tenaga Kerja UMKM di DIY Tahun 2020

Jenis Pekerja	Jumlah Usaha Mikro (Orang)	Jumlah Usaha Kecil (Orang)	Jumlah Usaha Menengah(Orang)	Jumlah
Laki-Laki	71.098	77.565	68.591	217.254
Perempuan	94.463	95.247	85.222	274.932
Jumlah	165.561	172.812	153.813	492.186

Sumber: Dataku Bappeda DIY

Dapat diketahui bahwa tahun 2020 jenis pekerja terbanyak yaitu pekerja perempuan dibandingkan dengan perkerja laki-laki, yaitu kurang lebih 280 ribu pekerja.

Tabel 4. 3. Jumlah Tenaga Kerja UMKM di DIY Tahun 2021

Jenis Pekerja	Jumlah Usaha Mikro (Orang)	Jumlah Usaha Kecil (Orang)	Jumlah Usaha Menengah (Orang)	Jumlah
Laki-Laki	144.124*	10.094*	1.339*	155.557*
Perempuan	140.878*	7.958*	770*	149.606*
Jumlah	285.002*	18.052*	2.109*	305.163*

Keterangan: Tanda *) menandakan data bersifat sangat sementara.

Sumber: Dataku Bappeda DIY

Dapat diketahui bahwa tahun 2021 jenis pekerja terbanyak yaitu pekerja laki-laki dibandingkan dengan pekerja perempuan, yaitu kurang lebih 155 ribu pekerja.

E. UMKM Berdasarkan Kabupaten atau Kota

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM DIY memperlihatkan data dari lima kabupaten/kota di DIY masih menjadi konsentrasi UMKM, masing-masing memiliki persentase UMKM di atas 97%. Secara jumlah UMKM terbanyak di yaitu berada di Kabupaten Sleman sebanyak 84.994, urutan kedua yaitu Kabupaten Bantul yaitu sebanyak 77.329. Kemudian disusul oleh Kabupaten Gunung Kidul sebanyak 53.859 unit, lalu Kabupaten Kulonprogo sebanyak 35.918 unit. Dan paling rendah adalah kota Yogyakarta yaitu sebanyak 32.446 unit.

Tabel 4. 5. Jumlah UMKM Berdasarkan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2021

Kab/Kota	Jumlah (Unit)
Kabupaten Gunung Kidul	53.859
Kota Yogyakarta	32.446
Kabupaten Bantul	77.329
Kabupaten Sleman	84.994
Kabupaten Kulon Progo	35.918
Jumlah	302.799

Sumber: Sibakul Dinas Koperasi dan UMK DIY

Berdasarkan data jumlah UMKM menurut Kabupaten/Kota di DIY pada tahun 2021 setelah perubahan pembagian jenis usaha pada Peraturan Gubernur No. 82 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019. Data tersebut menunjukkan jumlah UMKM terbanyak ada pada Kabupaten Sleman dan jumlah UMKM terendah ada pada Kota Yogyakarta. Dalam data tersebut terdapat 18.249 unit yang tidak dapat terdefinisikan karena terdapat pengusaha dengan KTP luar DIY usaha di DIY.

F. Perbedaan UMKM DIY Sebelum dan Setelah Peraturan Gubernur No. 82 Tahun 2019 Menurut Nilai Omset

UMKM di DIY memiliki karakteristik informal, yaitu usaha yang dicirikan dengan tidak adanya status badan hukum, tidak adanya sistem pencatatan keuangan, dijalankan dengan modal yang terbatas dan keahlian yang terbatas, serta penggunaan teknologi yang masih sederhana. Pengelolaan yang sederhana ini tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh UMKM. Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja dan UMKM adalah menjalin kemitraan dengan perusahaan yang lebih besar untuk mendapatkan pembinaan, bantuan modal, maupun lainnya. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan UMKM sekaligus akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pengelolaan UMKM yang dilakukan secara sederhana tercermin dalam data, usaha yang mempunyai izin khusus hanya 2,5 persen dan yang memiliki badan hukum lainnya hanya 1,8 persen. Demikian pula dengan pencatatan keuangan usaha sangat jarang dilakukan oleh pelaku UMKM. Hanya sekitar 5,2 persen dari UMKM yang sudah mempunyai izin khusus atau yang tidak berbadan hukum melakukan pencatatan laporan keuangan. Informasi lain juga menjelaskan bahwa mayoritas UMKM belum menggunakan komputer. Padahal, pemanfaatan komputer tidak terbatas hanya untuk melakukan laporan keuangan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mendesain produk, pemasaran produk dan lain-lain yang ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah produk UMKM. Data menunjukkan, UMKM yang menggunakan komputer hanya kurang dari 10 persen.

Untuk meningkatkan pendapatan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produknya, kemitraan menjadi salah satu cara yang tepat. Namun demikian, usaha ini masih belum menjadi pilihan bagi UMKM. Keterbatasan informasi menjadi salah satu kendala untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan besar. Hanya sekitar 12,8 persen UMKM yang menjalin kemitraan dengan perusahaan lain.

Perubahan pembagian jenis usaha pada jumlah usaha per sektor ekonomi setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur No. 82 Tahun 2019 memberikan perbedaan besar pada nilai omset per tahunnya.

Tabel 4. 6. Nilai Omset UMKM Menurut Skala Usaha Tahun 2018-2021

Skala Usaha	Nilai Omset dalam 1 Tahun			
	Sebelum Peraturan Gubernur No. 82 Tahun 2019		Sesudah Peraturan Gubernur No. 82 Tahun 2019	
	2018	2019	2020	2021
Usaha Mikro	8.505.000	8.589.000	26.063.802	28.631.019*
Usaha Kecil	30.975.000	31.279.000	96.199.162	28.631.019*
Usaha Menengah	114.450.000	115.574.000	114.711.996	118.882.984*
Jumlah	153.930.000	155.442.000	236.974.960	176.085.022*

Keterangan: Tanda *) menandakan data bersifat sangat sementara.

Sumber: Dataku BAPPEDA DIY



Mengacu pada data tersebut, pada tahun 2019 dan 2020, skala usaha mikro mengalami kenaikan nilai sekitar 18 juta. Usaha kecil juga mengalami kenaikan omset lebih besar dari usaha mikro yaitu sebesar 65 juta. Sedangkan pada usaha menengah mengalami penurunan omset tahunan sekitar 1 juta. Kenaikan dan penurunan tersebut merupakan dampak dari perbedaan jumlah pembagian jenis usaha tahun 2019 sebanyak 4 jenis usaha menjadi 15 jenis usaha pada tahun 2020. Pembagian yang lebih banyak dan terperinci menyebabkan jumlah usaha yang dicakup semakin luas dan nilai omset tahunan yang dimiliki cenderung meningkat/konstan/sedikit penurunan. Selain itu, pandemi yang terjadi selama 2 tahun terakhir juga menyebabkan ketidakstabilan dalam ekonomi DIY sehingga berdampak pada omset UMKM



BAB 5

Penutup

Perubahan-perubahan yang terjadi pada pembagian jenis usaha UMKM bukanlah tanpa alasan. Pemerintah ingin meningkatkan keakuratan dan keselarasan yang terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi serta mewujudkan data yang akurat, terkini dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan.

Setelah ditetapkan Peraturan Gubernur No. 82 Tahun 2019 mengenai Pedoman Pengelolaan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah daerah memberikan pembagian jenis usaha yang baru sebanyak 15 jenis. Hal tersebut menyebabkan adanya perbedaan dari beberapa sisi, misalnya hasil omset tahunan pada 3 tahun terakhir tidak stabil. Omset tahunan pada tahun 2019 dibandingkan dengan omset tahunan 2020 mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan omset tahunan 2021 yang tertulis masih sementara mengalami peningkatan. Selain dipengaruhi oleh adanya Pandemi Covid-19, ketidakstabilan juga dipengaruhi oleh perubahan pembagian jenis usaha yang terbagi pada beberapa klasifikasi baru tersebut.

Kesimpulannya, perubahan pembagian jenis usaha tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Penurunan omset terjadi karena penyesuaian terhadap peraturan baru.

